

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Penetapan Sektor Unggulan Di Provinsi Jawa Timur Wilayah Timur Tahun 2010-2014

Bambang Tri Wisnu Satria
Email : Wisnustr@gmail.com
PT. Bank Mega Tbk.

ABSTRACT

Title: "Analysis of the Economic Growth and Designation Sector Featured In East Java Province Eastern Region".The purpose of this research is: Knowing the pattern of economic growth in the district / city in East Java province eastern region, knowing what sectors be featured, flagship, prospectively, and lagging in district / city in East Java province east.The analytical methods used are: 1). Typology Analysis klassen2). AnalisaSLQ (Static Location Qoutient) and DLQ (Dynamic Location Qoutient), 3). Analysis GIS (Geographic information system).The results of the analysis using Klassen Typology analysis can be concluded that the pattern of economic growth and the District and City in the province of East Java East Region 4 Klassen typology classification of economic growth pattern that is region and Growing Fast Forward, Retarded, Fast Developing and Developed Depressed:Based on the analysis AnalisaSLQ (Static Location Qoutient) and DLQ (Dynamic Location Qoutient) and analysis of GIS (Geographic information system). Based on the value of SLQ and DLQ sectors that contributed most to the classification of Disadvantaged namely in Probolinggo to donate 11 (eleven) sector.

Keywords : *Economic Growth , Economic Sector seed , East Java, East Region*

ABSTRAK

Judul: "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Penetapan Sektor Unggulan Di Provinsi Jawa Timur Wilayah Timur". Tujuan dalam penelitian ini yaitu:Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jawa timur wilayah timur ,mengetahui sektor apa saja yang menjadi unggulan , andalan, prospektif, dan tertinggal pada kabupaten/kota di provinsi jawa timur wilayah timur .Metode analisa yang digunakan adalah: 1).Analisa Tipologi klassen2). AnalisaSLQ (Static Location Qoutient) dan DLQ (Dynamic Location Qoutient), 3). Analisis SIG (system information Geografis). Hasil analisis menggunakan Analisa Tipologi klassen dapat disimpulkan bahwa pola dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Wilayah Timur berdasarkan tipologi klassen 4 klasifikasi pola pertumbuhan ekonomi yaitu daerah Cepat Maju dan Tumbuh , Terbelakang, Berkembang Cepat, dan Maju Tertekan:Berdasarkan hasil analisis AnalisaSLQ (Static Location Qoutient) dan DLQ (Dynamic Location Qoutient) dan Analisis SIG (system information Geografis).Berdasarkan nilai SLQ dan DLQ sektor yang memberikan kontribusi yang paling banyak pada klasifikasi Tertinggal yaitu pada Kabupaten Probolinggo dengan menyumbangkan 11 (sebelas) sektor.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Ekonomi Unggulan, Jawa Timur Wilayah Timur.*

PENDAHULUAN

Ekonomi suatu daerah baik itu Kabupaten maupun kota yang berlangsung di Indonesia berjalan terus menerus dan tiap daerah tersebut berusaha untuk memajukan daerahnya. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan wilayahnya. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka daerah diharapkan akan terus memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan ekonomi di daerahnya tanpa menunggu bantuan dari pusat. Pembangunan Ekonomi adalah satu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada, dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 : 108).

Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang sekaligus indikator tersebut memberikan gambaran tentang sejauh mana aktifitas ekonomi daerah pada periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan kooperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan, (Nur Hidayati,2012).

Strategi pengembangan wilayah yang tepat merupakan urgensi dan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan baik oleh daerah yang masuk dalam kategori maju maupun daerah yang masih relative tertinggal karena mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah

pembangunan. Dalam realitasnya setiap daerah tentu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan kondisi daerah. Perbedaan kondisi ini akan membawa implikasi pada corak pembangunan yang diterapkan. Menurut Aryad (1999) peniruan mentah-mentah pola kebijakan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Dalam pembangunan suatu daerah, maka kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Pengembangan wilayah suatu wilayah berbasis sektor/sub sektor unggulan merupakan strategi pengembangan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi masyarakat lokal. Pada gilirannya, hal ini diharapkan mampu menjadi kontribusi penting bagi peningkatan pendapatan daerah tersebut, oleh karenanya, perlu strategi pengembangan yang tepat, guna mampu menemukan dan menggali potensi ekonomi di suatu daerah serta mampu menumbuhkan kembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdaya saing

(*Knowledge Based Economy*) sekaligus berbasis sumberdaya lokal (*Resource Based Economy*). Pemilihan sektor/sub sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah dan kerjasama antar pusat pertumbuhan adalah salah satu usaha.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan sektor/sub sektor yang mempunyai keunggulan baik ditinjau dari sisi penawaran dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi, dan kondisi social ekonomi produser di wilayah tersebut. Kondisi social ekonomi dimaksud mencakup penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur misalnya pasar dan kebiasaan produsen setempat, sedangkan dari sisi permintaan, dicirikan oleh kuatnya permintaan pasar domestik maupun internasional

Dalam Propinsi Jawa Timur sendiri terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota. Propinsi Jawa Timur terbagi lagi menjadi 4 koridor yang meliputi kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Timur, yaitu: Koridor Utara Selatan terdiri dari Gresik -Surabaya -

Sidoarjo – Mojokerto – Pasuruan– Malang – Blitar.Koridor Barat Daya terdiri dari Jombang - Kediri - Tulungagung - Trenggalek - Nganjuk- Madiun - Ponorogo - Pacitan - Magetan.Koridor Timur terdiri dari Probolinggo -Situbondo - Bondowoso - Lumajang – Jember - Banyuwangi. Koridor Utara terdiri dari Lamongan – Tuban - Bojonegoro - Ngawi - Bangkalan – Sampang - Pamekasan - Sumenep.

Percepatan pertumbuhan daerah bisa dicapai antara lain dengan memicu pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*) yang akan mendorong pertumbuhan daerah - daerah sekitarnya. Daerah - daerah biasanya sulit untuk berkembang cepat secara bersamaan. Pusat pertumbuhan diperlukan sebagai perangsang bagi pertumbuhan daerah sekitarnya (Zainal Arifin 2008). Dari uraian di atas terlihat nilai rata - rata pertumbuhan ekonomi koridor timur dengan nilai rata - rata pertumbuhan ekonomi koridor utara selatan tidak terlalu jauh. Melihat penjelasan dari (*Growth pole*) yang mendorong pertumbuhan daerah daerah sekitarnya. Dimana koridor timur memiliki potensi untuk setara dengan

koridor utara selatan yang sekaligus sebagai perangsang bagi pertumbuhan daerah sekitarnya.

Salah satu tujuan utama dari penelitian Ini yaitu mengklasifikasikan sektor usaha berdasarkan nilai SLQ (static Location Quotient) dan DLQ (Dynamic Location Quotient) dimana hasil analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan , sektor andalan , sektor prospektif dan sektor tertinggal. Berangkat dari situlah peneliti mengangkat judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Penetapan Sektor Unggulan Di Provinsi Jawa Timur Wilayah Timur Tahun 2010-2014“

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur wilayah Timur yang terdiri dari 7 Kabupaten dan Kota, yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo.

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yang berupa angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini

data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan cara mempelajari dan melakukan penganalisaan dan pengolahan terhadap data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder dapat diperoleh melalui literatur – literatur ataupun langsung datang ke dinas terkait guna meminta data untuk penelitian. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, dan instansi - instansi terkait dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara dokumentasi. Dimana, cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber – sumber pustaka lain yang masih memiliki hubungan dengan topic

permasalahan ini . Pengumpulan data yang dimaksud adalah dengan mendatangi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur agar data yang diperoleh lebih bersifat akurat.

Metode analisis data, yaitu, Analisis SLQ dan DLQ, Typologi Klassen dan SIG (*Sistem Informasi Geografi*). Dalam penelitian ini analisis SLQ dan DLQ digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi apa saja yang merupakan sektor ekonomi unggulan pada tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Wilayah Timur, dan System Informasi Geografis (SIG) untuk mengidentifikasi dimana wilayah yang memiliki pertumbuhan cepat maupun lambat.

Untuk mengetahui, komoditas, jasa, dan sektor unggulan (KJSU) tingkat kabupaten dan kota di provinsi jawa timur wilayah timur, penelitian ini menggunakan analisis (*Static Location Quotient – SLQ*) dan analisis (*Dynamic Location Quotient – DLQ*) (Kuncoro, 2012; 133-136). DLQ adalah modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi faktor pangsa pasar sektor dari waktu ke waktu.

Alat analisis tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi klasen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth And High Income*), daerah maju tapi tertekan (*High Income But Low Growth*), daerah berkembang cepat (*High Growth But Low Income*), daerah relative tertinggal (*Low Growth And Low Income*) (Syafrizal, 1997: 27-38; Kuncoro, 1993:Hill,1989)

PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting dalam analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Alasannya jelas karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan

ekonomi wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi wilayah ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat. Disamping itu analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah dan mengapa hal itu terjadi. Adapun perbedaaan dengan teori pertumbuhan ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi wilayah menekan perhatiannya pada ekonomi suatu daerah tertentu (Provinsi, Kabupaten, atau Kota) tidak pada suatu negara dan pertumbuhan ekonomi wilayah memasukkan unsur lokasi dan tata ruang ke dalam analisisnya sehingga kesimpulannya juga berbeda

Sektor unggulan merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dimana pertumbuhan industry - industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi tersebut memberikan pengertian

bahwa suatu daerah akan mempunyai persaingan pada sektor yang sama sektor unggulan apabila daerah dengan daerah lain, sehingga dapat

KATAGORI	URAIAN	kab/kota	
		NB	B
A	Pertanian,kehutanan,dan perikanan	5 Kab/Kota	2 Kab/Kota
B	Pertambangan dan Penggalian	4kab/Kota	3 Kab/Kota
C	Industri pengolahan	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota
D	pengadaan Liatrik dan Gas	5Kab/Kota	1Kab/Kota
E	Pengadaan air , pengolaan sampah	4Kab/Kota	3Kab/Kota
F	Konstruksi	3Kab/Kota	4Kab/Kota
G	Perdagangan besar dan eceran	3Kab/Kota	4Kab/Kota
H	Transoptasi dan pergudangan	4Kab/Kota	3Kab/Kota
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4Kab/Kota	3Kab/Kota
J	Informasi dan komunikasi	3Kab/Kota	4Kab/Kota
k	Jasa keuangan dan asuransi	4Kab/Kota	3Kab/Kota
L	Real estate	5Kab/Kota	2Kab/Kota
M,N	Jasa perusahaan	4Kab/Kota	3Kab/Kota
O	Administrasi pemerintah, pertahanan	4Kab/Kota	3Kab/Kota
P	Jasa pendidikan	5Kab/Kota	2Kab/Kota

tersebut dapat memenangkan menghasilkan ekspor.

Tabel 1. Hasil Pengelompokan kabupaten dan kota Basis dan Non-Basis Berdasarkan PDRB kabupaten dan Kota

Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3Kab/Kota	4Kab/Kota
R,S,T,U	Jasa lainnya	3Kab/Kota	4Kab/Kota

Sumber: BPS (data diolah)

Dilihat dari tabel 1. dapat diketahui bahwa hasil pengelompokan kabupaten dan kota basis dan non-basis terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan menunjukan masing – masing kabupaten dan kota memiliki basis dan nonbasis dalam tujuh belas sektor. Dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan basis di 2 kabupaten dan kota, sektor pertambangan dan penggalian basis di 3 kabupaten dan kota, sektor industri pengolahan basis di 4 kabupaten dan kota, sektor pengadaan listrik dan gas basis di 1 kabupaten dan kota, sektor pengadaan air, pengolahan sampah hanya basis di 3 kabupaten dan kota, sektor kontruksi unggul di 4 kabupaten dan kota, sektor perdagangan besar dan eceran basis di 4 kabupaten dan kota, sektor transportasi dan pergudangan basis di 3 kabupaten dan kota, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum basis di 3 kabupaten dan kota, sektor informasi dan komunikasi basis di 4 kabupaten dan kota, sektor jasa keuangan dan asuransi basis pada

3 kabupaten dan kota, sektor real estate basis pada 2 kabupaten dan kota, selanjutnya pada sektor jasa perusahaan basis pada 3 kabupaten dan kota, sektor administrasi pemerintah, pertahanan basis pada 3 kabupaten dan kota, sektor jasa pendidikan basis pada 2 kabupaten dan kota, sektor jasa kesehatan dan kegiatan social basis pada 4 kabupaten dan kota, dan yang terakhir yaitu sektor jasa lainnya basis di 4 kabupaten dan kota.

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 1. Dapat diketahui bahwa hanya 2 (dua) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam sektor pertanian, kehutanan dan pertanian yaitu: Kota Probolinggo, Kabupaten Jember. Sedangkan untuk 4 (lima) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam penyerapan sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang.

2. Pertambangan dan Penggalian

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Pertambangan dan Penggalian

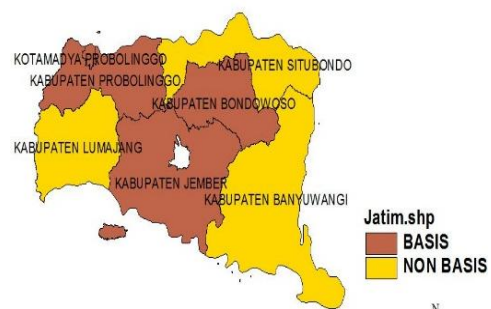
Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 2. Dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/kota yang Non-Basis dalam sektor pertambangan dan penggalian yaitu: Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo. Sedangkan Kecamatan yang Basis dalam sektor pertambangan dan penggalian hanya 3 (tiga) Kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang.

3. Industri Pengolahan

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Industri pengolahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. Industri Pengolahan



Sumber: GIS, (gambar diolah)

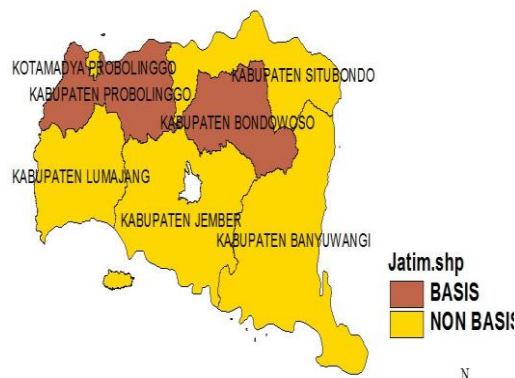
Dilihat pada gambar 3. Dapat diketahui bahwa hanya 3 (tiga)

Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Industri Pengolahan yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk 4 (empat) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/kota yang basis dalam sektor Industri Pengolahan yaitu: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember .

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Pengadaan Listrik Dan Gas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. Pengadaan Listrik dan Gas



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 4. Dapat diketahui bahwa hanya 5 (lima) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam sektor Pengadaan Listrik Dan

Gas yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo. Sedangkan untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang Basis dalam penyerapan sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu: Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso

5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah

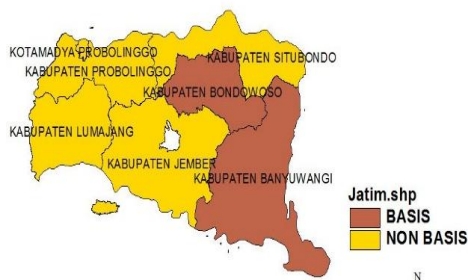
Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah. Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam sektor Pengadaan Air, Pengolahan sampah yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang , Kota Probolinggo. Sedangkan untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang Basis dalam penyerapan sektor Pengadaan, pengolahan sampah yaitu : Kabupaten Probolinggo , Kabupaten Bondowoso.

6. Kontruksi

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Kontruksi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Dan Eceran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 6. Kontruksi



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 6. Dapat diketahui bahwa hanya 5 (lima) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam sektor Kontruksi yaitu :Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember. Sedangkan untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Kontruksi yaitu : Kabupaten Banyuwangi , Kabupaten Bondowoso.

7. Perdagangan Besar dan Eceran

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Pedagangan Besar

Gambar 7. Perdagangan Besar dan eceran



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 7. Dapat diketahui bahwa hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Perdagangan besar dan eceran yaitu; Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember. Sedangkan untuk 4 (empat) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam Perdagangan besar dan eceran yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Genteng.

8. Transportasi dan Pergudangan

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Transportasi Dan Pergudangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 8. Transportasi dan Pergudangan



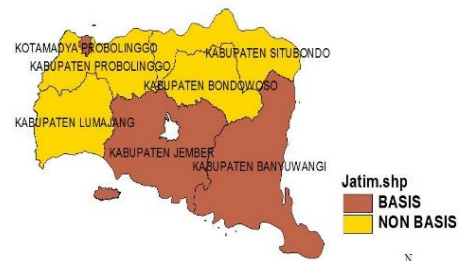
Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 8. Dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang Non-Basis sektor Transportasi dan pergudangan yaitu: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu : Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kota Probolinggo.

9. Penyediaan Akomodasi dan makan minum

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Sistem Informasi Geografis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum



Sumber: GIS, (gambar diolah)

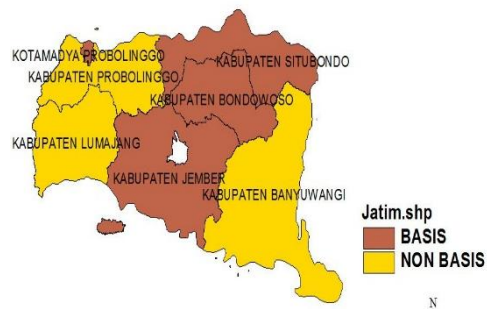
Dilihat pada gambar 9. Dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu : Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo.

10. Informasi Dan Komunikasi

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Informasi Dan Komunikasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Jasa Keuangan Dan Asuransi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini

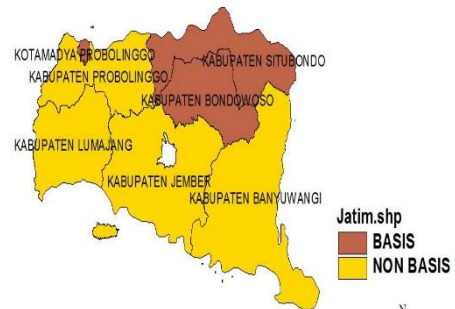
Gambar 10. Informasi dan komunikasi



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 10. Dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Informasi dan Komunikasi yaitu :Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Informasi dan Komunikasi yaitu: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo.

Gambar 11. Jasa keuangan dan asuransi



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 11 Dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu :Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu: Kabupaten

11.Jasa keuangan dan Asuransi

Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kota Probolinggo.

12. Real Estate

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sector Real Estate, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 12. Real estate



Sumber: GIS, (gambar diolah)

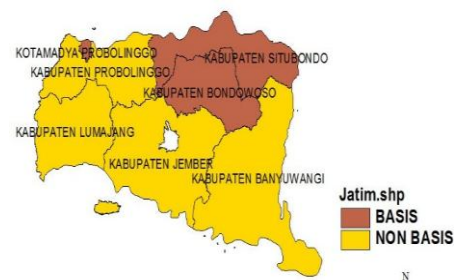
Dilihat pada gambar 12. Dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Real Estate yaitu : Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo. Sedangkan untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Real Estate yaitu:

Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo.

13. Jasa perusahaan

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Jasa Perusahaan , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 13. Jasa perusahaan



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 13. Dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Jasa Perusahaan yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Jasa Perusahaan yaitu:, Kabupaten Situbondo,

Kabupaten Bondowoso, Kota Probolinggo.

14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sector Administrasi Pemerintah, pertahanan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 14. Administrasi pemerintah dan pertahanan



Sumber: GIS, (gambar diolah)

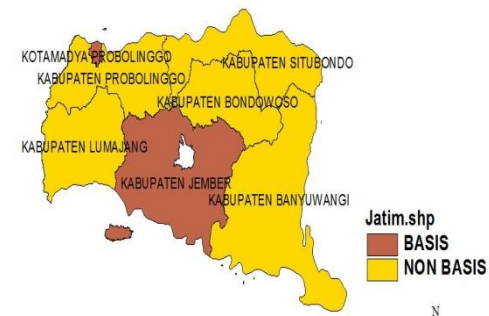
Dilihat pada gambar 14. Dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sector Administrasi pemerintah, Pertahanan yaitu :Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten/Kota lain merupakan

Kabupaten/Kota yang basis dalam sector Administrasi pemerintah, Pertahanan yaitu: Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kota Probolinggo.

15. Jasa pendidikan

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sector Pertambangan dan Penggalian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 15. Jasa pendidikan



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sector Jasa Pendidikan yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso. Sedangkan untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam

sektor Jasa Pendidikan yaitu : Kota Probolinggo, Kabupaten Jember.

16. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial



Sumber: GIS, (gambar diolah)

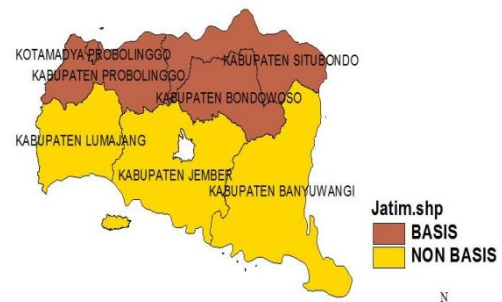
Dilihat pada gambar 16. Dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial yaitu :Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk 4 (empat) Kabupaten/Kota lain merupakan

Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kota Probolinggo.

17.Jasa Lainnya

Untuk mengetahui Kabupaten dan Kota mana yang memiliki basis maupun tidaknya pada sektor Pertambangan dan Penggalian , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 17. Jasa lainnya



Sumber: GIS, (gambar diolah)

Dilihat pada gambar 17. Dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang Non-Basis dalam penyerapan sektor Jasa Lainnya yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk 4 (empat) Kabupaten/Kota lain merupakan Kabupaten/Kota yang basis dalam sektor Jasa Lainnya dan Kegiatan Sosial yaitu: Kota

Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tipologi klassen dapat disimpulkan daerah yang termasuk dalam katagori Cepat Maju dan Tumbuh ada 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Probolinggo. Daerah yang termasuk kategori dalam Daerah Terbelakang ada 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Probolinggo. Daerah yang termasuk dalam kategori Berkembang cepat ada 1 (satu) daerah adalah Kabupaten Bondowoso. Daerah yang termasuk kategori dalam Maju Tertekan ada 1 (satu) satu daerah yaitu Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan nilai SLQ dan DLQ sektor yang memberikan kontribusi yang paling banyak pada klasifikasi Unggulan yaitu Kota Probolinggo dengan menyumbangkan 8 (delapan) sektor, selanjutnya berdasarkan nilai SLQ dan DLQ sektor yang memberikan kontribusi yang paling banyak pada klasifikasi Andalan yaitu : Kabupaten Jember

dengan menyumbangkan 8 (delapan) sektor, untuk klasifikasi Prospektif berdasarkan nilai SLQ dan DLQ sektor yang memberikan kontribusi yang paling banyak pada klasifikasi Prospektif yaitu Kabupaten Situbondo dengan menyumbangkan 7 (tujuh) sektor, dan yang terakhir pada klasifikasi tertinggal berdasarkan nilai SLQ dan DLQ sektor yang memberikan kontribusi yang paling banyak pada klasifikasi Tertinggal yaitu pada Kabupaten Probolinggo dengan menyumbangkan 11 (sebelas) sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bapeda, 2014, *Indikator Perekonomian Daerah Kabupaten Bangka ; Prediksi 2008 – 2012*, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banyuwangi, JATIM
- Bendavid-Val, Avrom, 1991, *Regional and Local Economic Analysis for Practioners*, Praeger

- Publisher, Fourt Edition, New York and London.
- Badan Pusat Statistik, 20011-20014, *Banyuwangi dalam Angka*, BPS Kabupaten Banyuwangi, Jawa timur.
- Blakeley, Edward J., 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*, Second edition, USA ; SAGE Publication Inc.
- Daldjoeni, N., 1997, *Geografi Baru, Organisasi Keuangan dalam teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Daldjoeni, N., 1997, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Cetakan Kelima, Penerbit Alumni, Bandung.
- Kadariah, 1985, *Ekonomi Perencanaan*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nahrawi, Yusuf M., 2005. "Identifikasi Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan", Tesis S2, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang. (tidak dipublikasikan).
- Richardson, H., W., 1977. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, (terjemahan paul Sihotang), Lembaga Penerbitan, FE-UI, Jakarta.
- Pebrina, Yudisrina Intan, 2005, "Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.4 No.1, 81-104, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya.
- Saharuddin, Syahrul, 2005, "Analisis Ekonomi Regional Sulawesi Selatan", *Analisis Ekonomi*, Maret 2006, Vol 3 No.1, 11-24, BPSDM, Sulawesi Selatan.
- Suharyadi, Purwanto 2015, "Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern", Penerbitan Salemba Empat, Jakarta.